



Bambang PW :

POROS MEDAN MERDEKA UTARA – AMPERA RAYA; UPAYA PENYELAMATAN ARSIP KEPRESIDENAN

Presiden Indonesia terpilih merupakan hasil demokrasi dari pemilihan umum. Itu sebabnya, setiap pemerintahan yang dipimpin presiden mempunyai kekhasan yang berbeda satu sama lain, baik dari visi dan misi, program kerja pemerintahan, cara berdiplomasi, komunikasi dengan masyarakatnya dan peristiwa lain yang menyertai rekam jejak perjalanan seorang Presiden. Oleh karenanya, rekam jejak perjalanan seorang Presiden dalam masa kepemimpinannya merupakan bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu diketahui masyarakat luas.

Memori kolektif bangsa tersebut merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Memori kolektif bangsa Indonesia selama ini menghadirkan masa-masa periodisasi dari masa pra kemerdekaan, masa paskakemerdekaan, masa pembangunan, dan masa reformasi, dan belum menghadirkan sejarah kepemimpinan sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat, seiring

dengan terbentuknya pemerintahan paskapemerintahan yang dianutnya, yaitu presidensial.

Menurut pakar politik Ramlan Surbakti, sistem presidensial merupakan salah satu komponen dari tatanan politik yang mencoba mewujudkan tujuan negara. Dalam sistem presidensial, fungsi-fungsi negara yang dimaksud meliputi pembuatan peraturan (legislatif), penerapan peraturan (eksekutif), dan penghakiman peraturan (yudikatif). Kepala pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh presiden dan semua menteri merupakan pembantu Presiden yang bertanggung jawab terhadap Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden dengan segala kekuasaan eksekutifnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan politik suatu bangsa. Dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan Presiden di Indonesia selalu dibatasi oleh konstitusi menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang dasar”. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini merujuk kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial.

Rekam jejak perjalanan seorang Presiden merupakan bagian dari rekaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai memori kolektif bangsa dan cerminan dari seluruh komponen kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Arsip yang tercipta dari seorang Presiden pada masa periode tertentu menjadi bukti prestasi karya bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional.

Memorial Presiden dan Arsip Kepresidenan

Ada dua cara untuk menghadirkan rekam jejak Presiden guna menuntaskan keingintahuan masyarakat terhadap figur seorang presiden. Pertama, membangun ‘*Memorial Presidensial*’ merupakan wahana koleksi dari seorang Presiden yang disajikan dalam suatu museum/

memorial, sebagian besar koleksi umumnya berupa 'artefak' dan didukung sebagian dalam bentuk khazanah arsip, termasuk rekam jejak perjalanannya dari sejak lahir, mengikuti pendidikan maupun pengabdian sebelum menjabat Presiden. Sisi-sisi kehidupan sebelum menjabat sebagai Presiden ataupun diluar tugasnya sebagai pemimpin negara bahkan terkadang lebih 'humanis' untuk diketahui oleh masyarakat. Cara seperti ini, sudah dimulai di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Korea, maupun negara-negara lainnya.

Kedua, melalui '*Presidential Archives*' atau lebih dikenal dengan arsip kepresidenan. Pemahaman tentang arsip kepresidenan tentunya harus dipahami dalam konteks pemberdayaan lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan menurut David R. Kepley merupakan bagian dari lembaga informasi publik yang memberikan kontribusi untuk: (1) melestarikan budaya masyarakat; (2) memberi inspirasi rasa hormat terhadap kelampauan; (3) member kemungkinan kepada pengambilan keputusan dan rakyatnya untuk belajar tentang masa lampau; (4) mengizinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang hak-hak hukum mereka; dan (5) mengizinkan setiap individu untuk melihat secara jelas tentang episode kejadian tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya.

Itu artinya, lembaga kearsipan mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya termasuk terhadap khazanah arsip. Di Indonesia, kehadiran lembaga kearsipan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan lembaga kearsipan menjadi kebutuhan bangsa dalam mewariskan informasi sejarah perjalanan bangsa kepada generasi

yang akan datang.

Dengan demikian, arsip kepresidenan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan (ANRI) harus diartikan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip tentang kepresidenan baik itu selaku individu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maupun tempat kediaman istana Presiden itu sendiri. Artinya, upaya penyelamatan arsip harus mampu merefleksikan fungsi dan tugas presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang tidak terpisahkan dan bahkan tidak terbedakan satu sama lain, maka pemegang jabatan presiden (*ambtsdrager*) menjadi sangat kuat kedudukannya, tidak hanya mencakup dua kualitas kepemimpinan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga dukungan kelembagaan yang berdomisili pada 'ring 1 istana –sekitar Jalan Merdeka Utara' mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, yaitu:

- Sekretariat Negara, bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
- Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
- Sekretariat Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden.

- Sekretariat Militer Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai catatan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, kedudukannya berada di kementerian Sekretariat Negara.

Baik *memorial presidential* ataupun *presidential archives* pada intinya terkait dengan seorang Presiden dari satu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan Presiden berikutnya. Kedua-duanya harus menampilkan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimana ada 7 orang yang pernah menjabat sebagai Presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, KH. Abdurrachman Wachid, Megawati Soekarnoputri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono, serta Joko Widodo yang sekarang ini masih menjabat Presiden. Khazanah arsip yang ditampilkan seyogyanya tidak membatasi materi arsip mengenai kegiatan Presiden atau selama seseorang menduduki jabatan sebagai Presiden, materi arsip bisa bermula dari biografi dari sejak lahir, aktivitas dalam partai politik, maupun pekerjaan lain sebelum menjabat Presiden. Pada prinsipnya, materi arsip harus dapat menceritakan pencapaian (*hall of fame*) seorang Presiden, termasuk kehidupan sosial dan budaya baik itu di lingkungan keluarga organisasi,

partai politik, dan pemerintahan.

Strategi Penelusuran Arsip Kepresidenan

Dalam konteks penyelamatan arsip kepresidenan maka pendekatan penilaian secara makro (*macro appraisal*) sebagai suatu strategi penilaian modern merupakan program penilaian yang tidak hanya kepada satu pencipta arsip saja tetapi menyangkut keseluruhan informasi yang terkandung dalam seluruh lembaga dan mempunyai hubungan keterkaitan informasi dengan arsip yang lain, lebih khususnya tentang kepresidenan yang semuanya berporos di jalan Merdeka Utara. Pencipta arsip lainnya, selain berasal dari jalan Medan Merdeka Utara yang menciptakan arsip kepresidenan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, partai politik pengusung, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, pemerintah pusat dan daerah serta mabes TNI (tergantung jabatan pada pemerintahan sebelumnya), dan keluarga.

STRATEGI PENELUSURAN

Penilaian makro dilakukan terhadap tugas dan fungsi organisasi yang memiliki kesamaan informasi tentang kepresidenan dan bukan berdasarkan series arsip (*records series*). Oleh karenanya, penentuan terhadap arsip kepresidenan menjadi bagian yang krusial dan memerlukan penganalisisan yang cermat menyangkut nilai informasinya, biaya maupun dampak yang akan timbul dari suatu keputusan penilaian tersebut.

Namun hal utama dan terpenting, dalam rangka penyelamatan dan pelestarian khazanah arsip kepresidenan untuk masa mendatang atau periode berikutnya, perlu dilakukan terobosan baru sebagai bagian dari strategi akuisisi arsip. Terobosan yang dimaksud bukan hanya berbicara dan berhenti di hilir saja-mendapatkan arsip statis melalui akuisisi arsip saja, tetapi mulai dari hulu, yaitu mengoptimalkan pembinaan kearsipan terhadap

lembaga-lembaga kepresidenan (Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden, dan Sekretariat Kabinet) oleh ANRI sehingga nantinya proses penyelamatan arsip akan mengalir secara terus menerus dan berkualitas. Dikatakan berkualitas, karena diharapkan proses penciptaan arsip kepresidenan sudah diantisipasi dan dikelola sejak awal oleh mereka-mereka selaku pencipta arsip kepresidenan yang berada di jalan Medan Merdeka Utara. Arsip kepresidenan yang diciptakan benar-benar faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan, sehingga ANRI selaku lembaga penyedia informasi nantinya akan benar-benar menyajikan arsip kepresidenan ini sebagai bukti pertanggungjawaban nasional setiap saat tanpa harus menunggu untuk diolah oleh ANRI.

Pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI meliputi: **(1) Kebijakan**, untuk memperkuat tujuan '*presidential archives*' perlu dilakukan MoU yang melibatkan ANRI dan pencipta arsip di lingkungan lembaga-lembaga kepresidenan, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi upaya peningkatan kelembagaan, pengembangan sistem pengelolaan arsip dan SDM; **(2) Kelembagaan**, mengoptimalkan peran unit kearsipan sebagai organisasi kearsipan yang mendukung kegiatan pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip. Keberadaan Unit Kearsipan I di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan menghidupkan Unit kearsipan II masing-masing di Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden sebagai bagian dari Unit Kearsipan I di Kementerian Sekretariat Negara, serta Unit Kearsipan I di lingkungan Sekretariat Kabinet; **(3) Sistem pengelolaan arsip**, mendorong pencipta arsip untuk menyiapkan instrumen pengelolaan arsip dinamis (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, dan klasifikasi keamanan dan akses arsip)

sebagai upaya untuk menciptakan dan melestarikan isi, konten, dan struktur dari suatu arsip dalam suatu kerangka kerja pengelolaan arsip dinamis (*recordkeeping*) sehingga mampu menjamin keutuhan otentisitas dan reliabilitas arsip; **(4) SDM Kearsipan**, memberdayakan SDM kearsipan secara optimal melalui pelatihan pengelolaan arsip dan mengangkat Arsiparis sebagai tenaga yang profesional di bidang kearsipan. Dengan menjadi Arsiparis maka kompetensi yang dimilikinya mampu memberi pengaruh terhadap pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip; dan **(5) Sarana dan Prasarana**, menyediakan sarana pendukung peralatan penyimpanan arsip di setiap unit pengolah dan unit kearsipan, serta menyiapkan gedung tempat menyimpan arsip inaktif yang menjadi tanggungjawab unit kearsipan sebagai ruang transisi sebelum nantinya akan diserahkan ke ANRI.

Adanya kegiatan 'hulu-melalui pembinaan kearsipan terhadap lembaga-lembaga kepresidenan oleh ANRI tentunya ini harus dimaknai sebagai langkah awal untuk mendapatkan arsip-arsip kepresidenan untuk Presiden periode berikutnya sehingga ada sinergi antara ANRI dengan pencipta arsip khususnya di lingkungan lembaga kepresidenan. Ada komitmen yang kuat untuk menghasilkan arsip kepresidenan yang berkualitas, karena itu sinergi poros jalan Merdeka Utara dengan Ampera Raya (lokasi kantor ANRI) harus dibangun sejak dini, sebagai upaya penyelamatan arsip kepresidenan, sekaligus merupakan bentuk representasi dalam rangka mempertajam visi dan misi ANRI, serta mengenalkan tugas dan fungsi ANRI secara eksplisit kepada masyarakat bahwa pemanfaatan arsip melalui pendekatan reflektif tidak hanya untuk peneliti saja tetapi juga kepada masyarakat luas yang bangga akan sejarah dari rekam jejak Presidennya.